

PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT

Oleh:

Virginia Dillys Kurniawan¹

I Gede Perdana Yoga²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: virginiadkurniawan@gmail.com, perdanayoga@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this research is to examine the misuse of royal family protection provisions, reviewed from the perspective of international human rights, norms, and culture. This study specifically analyzes the implementation of the Lese Majeste law in Thailand, which regulates the protection of the monarchy institution and its implication for freedom of expression and fundamental rights of citizens. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach and international legislative framework through comparative analysis of universal human rights standards as stipulated in the International Covenant on civil and Political Rights (ICCPR) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Data in this study were obtained from comprehensive literature analysis, including court decisions, reports from international human rights organizations, and United Nations documents. The findings of this research demonstrate that the existence of Thailand's royal family protection law has violated human rights, social rights, and political rights of the people from an international law perspective. The study identifies inconsistencies between the practical application of the Lese Majeste provision and the principles of proportionality and legitimacy in the limitation of human rights as regulated in Article 19 paragraph (3) of the ICCPR.*

PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT

Keywords: *Lese Majeste, International, Human Rights, Kingdom of Thailand, Royal Family.*

Abstrak. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji penyalahgunaan pasal pelindung keluarga kerajaan, ditinjau dari hak asasi manusia internasional, norma, dan budaya. Penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi undang-undang Lese Majeste di Thailand yang mengatur perlindungan terhadap institusi monarki dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi serta hak-hak fundamental warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan internasional melalui kajian komparatif terhadap standar hak asasi manusia universal yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Data dalam penelitian ini diperoleh dari analisis literatur secara komprehensif, termasuk putusan pengadilan, laporan organisasi hak asasi manusia internasional, dan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang pelindung keluarga kerajaan Thailand telah menciderai hak asasi manusia, hak sosial, dan hak politik masyarakat dari perspektif hukum internasional. Penelitian menemukan ketidaksesuaian antara praktik penerapan pasal Lese Majeste dengan prinsip proporsionalitas dan legitimasi dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

Kata Kunci: *Lese Majeste, Internasional, Hak Asasi Manusia, Kerajaan Thailand, Keluarga Kerajaan.*

LATAR BELAKANG

Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hukum Thailand merupakan salah satu bentuk dari penerapan *Lese Majeste* yang bertujuan untuk melindungi kehormatan, martabat, dan wibawa anggota senior keluarga Kerajaan Thailand dari penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman. Secara substansi, pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang menghina, mencemarkan nama baik, atau mengancam Raja, Ratu, Putra Mahkota, maupun Regen, dapat dijatuhi hukuman penjara antara tiga hingga lima belas tahun. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi salah satu

pasal yang paling keras dalam sistem hukum Thailand, karena berkaitan langsung dengan institusi monarki yang dianggap sakral dan menjadi simbol persatuan bangsa Thailand.

Pada dasarnya, konsep *Lese Majeste* sendiri berasal dari sistem hukum monarki di Eropa, khususnya pada masa kerajaan-kerajaan absolut, di mana penghinaan terhadap raja dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara. Seiring waktu, beberapa negara menghapus atau menyesuaikan ketentuan ini sejalan dengan berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Namun, berbeda dengan banyak negara lainnya, Thailand tetap mempertahankan pasal ini bahkan memperketat penerapannya, terutama setelah terjadinya beberapa gejolak politik dan pergantian kekuasaan di negara tersebut. Dalam konteks modern, Pasal 112 menjadi salah satu instrument hukum yang paling kontroversial di Thailand. Meskipun secara normatif dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kehormatan monarki, dalam praktiknya pasal ini sering kali digunakan secara berlebihan dan dijadikan alat politik untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun monarki. Banyak organisasi pejuang hak asasi manusia, baik dari dalam maupun luar negeri, menilai bahwa penerapan pasal ini telah menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh hukum internasional, termasuk oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) yang telah diratifikasi oleh Thailand.

Perdebatan di masyarakat pun semakin meningkat, terutama sejak munculnya gelombang demonstrasi besar-besaran pada tahun 2020 yang dipelopori oleh kelompok mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Mereka menuntut reformasi terhadap monarki serta penghapusan atau setidaknya revisi terhadap Pasal 112. Bagi banyak warga Thailand, keberadaan pasal ini tidak lagi relevan dengan semangat zaman yang semakin menuntut transparansi, demokrasi, dan kebebasan berbicara. Sebagian masyarakat menilai bahwa hukum ini telah menciptakan ketakutan bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau monarki karena bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat.

Selain itu, perbandingan antara masa pemerintahan Raja Bhumibol Adulyadej dan Raja Maha Vajiralongkorn juga menjadi pemicu meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Raja Bhumibol dikenal luas sebagai seorang Raja yang dihormati karena

PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT

kedekatannya dengan rakyat dan peran aktifnya dalam Pembangunan nasional.¹ Sebaliknya, Raja Vajiralongkorn dianggap kurang memiliki keterikatan emosional dan moral dengan rakyatnya, serta dinilai sebagai pemimpin dengan pemerintahan yang tidak efektif seperti pendahulunya dalam menjaga keharmonisan terhadap lembaga monarki dan rakyat. Akibatnya, tingkat kepercayaan terhadap lembaga monarki mengalami penurunan, dan kritik terhadap sistem pemerintahan maupun lembaga kerajaan semakin meningkat.²

Melihat kondisi tersebut, muncul berbagai tuntutan dari kalangan akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil agar Pasal 112 dapat diperbaharui dan direformasi demi menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bagi sebagian besar masyarakat Thailand, perubahan terhadap pasal ini bukan sekedar bentuk perlawanan terhadap monarki, melainkan langkah menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya, di mana kebebasan berpendapat dapat dijamin tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi. Dengan demikian, persoalan Pasal 112 tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan moral dalam perjalanan demokrasi Thailand kontemporer.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 112 KUHP tentang *Lese Majeste* di Thailand?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat penerapan pasal 112 KUHP di Thailand?

Tujuan Penulisan

1. Meninjau dan menganalisis penerapan pasal 112 KUHP tentang *Lese Majeste* di Thailand serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat penerapan pasal 112 KUHP di Thailand.

¹ Chachavalpongpun, Pavin. "Kingdom of Fear: Royal Governance under Thailand's King Vajiralongkorn." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 3 July 2022, p. 1868103422111111, <https://doi.org/10.1177/18681034221111176>.

² Grossman, Nicholas, and Dominic Faulder. "King Bhumibol Adulyadej, a Life's Work: Thailand's Monarchy in Perspective." *CONTEMPORARY SOUTHEAST ASIA*, vol. 34, no. 1, 2012, p. 128, <https://doi.org/10.1355/cs34-1f>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan yang dikaji dalam kajian komprehensif dan komparatif atau *conceptual approach*. Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber pada pengkajian beberapa literatur, dan data yang diperoleh berasal dari analisis data primer yaitu penelusuran bahan hukum serta analisis beberapa pendapat ahli hukum, dan data yang diperoleh berasal dari analisis data primer yaitu penelusuran bahan hukum serta analisis beberapa pendapat ahli hukum, dan data sekunder adalah hasil wawancara oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan dan Analisis Penerapan Pasal 112 KUHP Tentang *Lese Majeste* di Thailand Serta Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial dan Politik Masyarakat.

1. Teori *Lese Majeste*

Kata *Lese Majeste* merupakan istilah yang diambil dari bahasa Prancis yang berarti “berbuat salah kepada Yang Maha Agung”. Pada perkembangannya, pasal ini disusun dan diterapkan dengan harapan dapat melindungi keluarga Kerajaan agar tidak terdampak oleh kritikan ataupun pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.³ Montesqui menuliskan di bukunya “jika kejahatan *Lese Majeste* tidak dapat ditentukan, ini saja sudah cukup, untuk pemerintah merosot menjadi kekuasaan sewenang-wenang”. *Lese Majeste* adalah salah satu produk hukum yang diserap oleh negara yang menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Delik aduan *Lese Majeste* dapat dilaporkan oleh siapapun dan atas siapapun. Setiap delik aduan harus dilakukan penyelidikan secara formal oleh pihak kepolisian. Dari segi hukum yang menertibkan perilaku masyarakat umum dan hukum yang berkaitan dengan Kerajaan, *Lese Majeste* dinilai sebagai salah satu hukum yang paling ketat di dunia.⁴

2. Pasal 112 Menurut Hukum Thailand

Pasal	112	berbunyi	“ผู้ใดหมิ่นประมาท	ดูหมิ่น
			หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์	พระราชินี
				รัชทายาท

³ Kelly, G. A. “From Lese-Majeste to Lese-Nation: Treason in Eighteenth-Century France.” *Journal of the History of Ideas*, vol. 42, no. 2, Apr. 1981, p. 269, <https://doi.org/10.2307/2709320>.

⁴ Bawōnsak ‘Uwannō. *Lèse Majesté in Thailand*. 2014.

PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT

หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี" yang artinya "siapa pun yang mencemarkan nama baik, menghina, dan mengancam Raja, Ratu, Pewaris Takhta, atau Pemangku Takhta diancam penjara selama 3 sampai 15 tahun".

3. Sistem Monarki

Sistem monarki merupakan sistem pemerintahan dengan bentuk Kerajaan, biasanya sistem monarki mempunyai Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan yang bertugas dalam memutuskan suatu hal dalam bidang pemerintahan.⁵ Sistem pemerintahan monarki memiliki beberapa jenis diantaranya :

- a. Monarki mutlak, yaitu sistem pemerintahan di mana seluruh kekuasaan berada di tangan raja dan tidak dibatasi oleh hukum atau konstitusi apapun.
- b. Monarki konstitusional, yakni bentuk pemerintahan yang menempatkan raja sebagai kepala negara dengan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi, sehingga setiap tindakannya harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Monarki parlementer, yaitu sistem kerajaan yang melibatkan keberadaan parlemen serta para Menteri yang bertanggung jawab, baik secara individu maupun kolektif, kepada lembaga parlemen tersebut.

Thailand sendiri menggunakan sistem monarki parlementer dengan kepala negara Perdana Menteri yang menjalankan tugas sebagai kepala administrasi pemerintahan.⁶

4. Freedom Speech

Teori *freedom speech* adalah konsep kebebasan berbicara. Teori ini menekankan bahwa masyarakat harus diberikan akses pada media massa agar dapat memperoleh kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara juga harus dibatasi untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah ujaran kebencian atau *hate speech*. Dalam konteks kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat juga harus dijamin sebagai hak asasi manusia. Hak kebebasan berbicara memegang peranan yang penting dalam menjamin keberadaan sistem politik yang demokratis dan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia lainnya.⁷

⁵ B. Syafuri. "PERCATURAN POLITIK BANI UMAIYAH DALAM MENDIRIKAN PEMERINTAHAN MONARKI." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, vol. 12, no. 2, 13 Jan. 2022, pp. 13–33, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i2.5229>.

⁶ Puangchon Unchanam. *Royal Capitalism*.

⁷ Selby, Don. *Human Rights in Thailand*. Philadelphia, University Of Pennsylvania Press, 2018.

5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan mencari”.⁸ Dalam konteks ini, teori tentang kebebasan berbicara menekankan perlunya akses masyarakat pada media massa agar dapat memperoleh kebebasan berbicara.⁹

Pasal 112 merupakan pasal yang mengatur tentang perlindungan anggota Kerajaan yang berbunyi “siapa pun yang mencemarkan nama baik, menghina, dan mengancam Raja, Ratu, Pewaris Takhta, atau Pemangku Takhta diancam penjara selama 3 sampai 15 tahun”. Dengan pasal ini, semua orang mencemarkan nama baik anggota keluarga Kerajaan baik secara tersurat maupun tersirat dapat diancam dengan hukuman tersebut.¹⁰ Kepolisian Thailand cukup ketat mengenai permasalahan ini, terutama bagi pihak yang menjadi oposisi pemerintah dan Kerajaan. Masyarakat Thailand merasa pasal ini tidak adil dan tidak relevan dengan keadaan saat ini. Pasal ini dibuat pada saat pemerintahan raja sebelumnya, Raja Bhumibol Adulyadej¹¹ dikarenakan pada saat mulai menjabat, adalah masa masa usainya perang dingin sehingga masih banyak pihak yang oposisi dengan pemerintah dan juga dapat mengancam keluarga Kerajaan. Aturan Pasal 112 ini tidak berubah sejak diberlakukannya hukum pidana Thailand pada 1908, dan kemudian diperkuat pada 1976.¹²

Telah terjadi banyak penangkapan pada warga sipil bahkan ada anggota parlemen yang terancam posisinya dikarenakan hal ini. Banyak terjadi demonstrasi kepada pihak pemerintah untuk mengganti atau menghapuskan pasal ini karena dirasa telah merugikan banyak warga sipil yang tidak bersalah.¹³

⁸ Fathinnuddin, Muhammad. “Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, vol. 3, no. 3, 1 Nov. 2016, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i3.7863>.

⁹ Wayarabi, Hadi. “Deklarasi Nasional HAM Terhadap Pengembangan Hak-Hak Asasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 22, no. 6, 7 June 2017, p. 552, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no6.1019>.

¹⁰ Hewison, Kevin. “Thaksin Shinawatra and the Reshaping of Thai Politics.” *Contemporary Politics*, vol. 16, no. 2, 21 May 2010, pp. 119–133, <https://doi.org/10.1080/13569771003783810>.

¹¹ Pye, Lucian W., and Paul M. Handley. “The King Never Smiles: A Biography of Thailand’s Bhumibol Adulyadej.” *Foreign Affairs*, vol. 85, no. 6, 2006, p. 178, <https://doi.org/10.2307/20032196>.

¹² Engel, David. *Law and Kingship in Thailand during the Reign of King Chulalongkorn*. University of Michigan Press.

¹³ Nagari Yanottami, and Dedik Fitra Suhermanto. “GERAKAN MELAWAN HUKUM MONARKI DI THAILAND.” *Jurnal ISIP*, vol. 19, no. 2, 7 Aug. 2023, pp. 66–74, <https://doi.org/10.36451/jisip.v19i2.3>.

PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT

Pada tanggal 16 Desember 1946, Thailand resmi menjadi anggota PBB dan bersamaan dengan pelantikan Raja Bhumibol. Hingga saat ini, Thailand telah mendapat teguran beberapa kali terkait *Lese Majeste* oleh PBB. Thailand diminta untuk melakukan pengkajian ulang Undang-undang tersebut, selain PBB banyak organisasi internasional sendirinya. Namun, setelah mendapat teguran oleh PBB, *Lese Majeste* hadir pada saat konstitusi Thailand diamandemen, yang berbunyi “Raja harus ditempatkan di singgasana dalam posisi yang disanjung dan tidak boleh dicemari. Tiada seorang pun boleh menyampaikan tuduhan atau aksi dalam bentuk apapun terhadap Raja.” Akan tetapi tidak ada definisi secara jelas mengenai hinaan seperti apa yang termasuk dalam hinaan terhadap keluarga kerajaan. Pemaknaan *Lese Majeste* bisa dikatakan masih cukup rancu, terlalu luas dan hukumannya terlalu keras.¹⁴

Menurut pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan mencari”. Dalam konteks ini, teori tentang kebebasan berbicara menekankan perlunya akses masyarakat pada media massa agar dapat memperoleh kebebasan berbicara. Hal ini juga tentunya dapat menunjang kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dengan mendengarkan aspirasi dan keluhan Masyarakat.¹⁵

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi Akibat Penerapan Pasal 112 KUHP di Thailand

1. Kasus Salah Satu Anggota Parlemen, Ice Rakchanok Srinok

Ice Rakchanok Srinok yang berasal dari Partai Pergerakan Maju [*พรรคก้าวหน้าไกล (Phak Kao Klai)*] diancam penjara 6 tahun dan dikeluarkan dari parlemen dikarenakan beliau mengemukakan pendapatnya melalui *twitter* dengan cara *tweet* dan *me-retweet* sebuah postingan¹⁶ yang mengatakan bahwa pemerintah Thailand

¹⁴ Baber, Sukrat. “Shout for Freedom to Curse at the Kingdom: Contrasting Thai Lèse Majesté Law with United States First Amendment Freedoms.” *Indiana International & Comparative Law Review*, vol. 24, no. 3, 3 Jan. 2014, pp. 693–728, <https://doi.org/10.18060/18281>.

¹⁵ Asia, in. *Kebebasan Berekspresi Dan Ketertiban Umum*. UNESCO Publishing, 30 Apr. 2020.

¹⁶ PPTVHD36, Get to know! “Ice Rakchanok Srinok” MP moves forward after bering hit with 112 cases, PPTV Online, <https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/212422> (diakses pada 2 Januari 2024)

berhenti mengimport vaksin selama pandemi Covid dan hanya menggunakan vaksin dari Perusahaan “Siam Bioscience Company” yang merupakan Perusahaan dari anggota Kerajaan¹⁷. Saat ini kasusnya masih berjalan dan sedang menunggu Keputusan pengadilan.

2. Kasus Jatuporn, *Street Fashion Walk*

Pada 29 Oktober 2020, kelompok aktivis yang menyuarkan keadilan Thailand mengadakan street fashion walk di jalan Silom dengan tema politik. Jatuporn, atau yang sering dipanggil New mengikuti acara tersebut dan menggunakan pakaian tradisional Thailand berwarna merah muda dengan menggunakan aksesoris payung. Setelah mengikuti acara *street fashion walk*, New ditangkap dan dituntut pasal 112 karena dianggap menghina ratu. Beberapa bulan kemudian New dipenjarakan diharuskan menjadi pekerja sosial. New tidak bermaksud untuk meniru siapapun dan New merasa tidak seharusnya dia ditangkap. Dalam kasus ini, pihak kepolisian seperti mencari cari kesalahan New dan sudah diincar untuk disakiti.¹⁸

3. Kasus Aek, Remaja 17 Tahun yang Ditangkap

Aek merupakan salah satu pejuang keadilan bersuara dari kalangan remaja yang ditangkap oleh kepolisian disebabkan pasal 112. Pada akhir bulan Desember 2020, Aek yang berumur 17 tahun ikut menyuarkan keadilan saat demo sedang berlangsung di monument raja Taksin, Wongwian Yai. Pada bulan Mei, Aek dilaporkan dan dipanggil oleh kepolisian Buppharam serta pengadilan untuk diadili. Aek menyatakan sebagai pelajar, kita seharusnya menyuarkan kepentingan umum, karena sebagai anak muda maka kaum muda tidak akan mengabaikan politik dan tidak akan tunduk kepada yang punya kuasa. Aek juga dituntut karena menggunakan baju ‘crop top’ ketika berjalan di Siam Paragon bersama dengan pemimpin koalisi Thammasat.¹⁹

¹⁷ BBC News, COVID-19: Thailand signs contract to purchase vaccines Siam Bioscience Company under the royal name join in action, BBC, <https://www.bbc.com/thai/55097716> (diakses pada 2 Januari 2024).

¹⁸ iLaw Freedom, Thai dresses, fermented fish sauce, section 112 and the changed life of New Chatuporn, iLaw Articles, https://freedom.ilaw.or.th/node/912?fbclid=IwAR3KI0o37Y6SzvV0V1_lhE8AykZUuCyJ9gYPhTGbp6f67vspIlrjkomTG8 (diakses pada 2 Januari 2024).

¹⁹ BBC News, The Royal Institution : “He will silence us” opens the hearts of the young people who were the first to be charged with Section 112, BBC, <https://www.bbc.com/thai/thailand-57486861> (diakses pada 2 Januari 2024).

PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *Lese Majeste* di Thailand seringkali disalahgunakan oleh para pihak pendukung pemerintah untuk menangkap para pihak oposisi pemerintah. Bentuk dasar hukum *Lese Majeste* dalam hukum positif Thailand berada di pasal 112 yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi anggota keluarga Kerajaan dari hinaan dan kritikan.
2. Penyalahgunaan pasal 112 ini seringkali menimbulkan pro kontra di masyarakat karena telah terjadi banyak kasus penangkapan orang yang tidak bersalah. Kasus yang disebabkan oleh pasal 112 ini seringkali menyiksa para aktivis yang ditangkap dimana hal ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, dengan adanya pasal 112 ini juga menyebabkan tertekannya Masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya sehingga hal ini juga termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia.

Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan :

1. Diperlukan adanya perombakan pada pasal 112 dengan memberikan definisi secara jelas mengenai hinaan seperti apa yang dianggap sebagai hinaan terhadap anggota keluarga Kerajaan sehingga tidak ada lagi asal tangkap orang yang tidak bersalah dengan sembarangan atas dasar orang tersebut merupakan pihak oposisi pemerintah.
2. Masyarakat Thailand perlu diberikan kebebasan berpendapat tetapi tetap dengan Batasan yang jelas tanpa menghina ataupun menjatuhkan anggota keluarga Kerajaan. Dengan adanya kebebasan berpendapat bagi masyarakat maka pihak pemerintah juga dapat memperbaiki kekurangan dalam sistem pemerintahan menuju lebih baik sehingga dapat menjadi lingkungan yang sejahtera bagi masyarakat..

DAFTAR REFERENSI

Asia, in. *Kebasan Berekspresi Dan Ketertiban Umum*. UNESCO Publishing, 2020.

- B. Syafuri. "PERCATURAN POLITIK BANI UMAIYAH DALAM MENDIRIKAN PEMERINTAHAN MONARKI." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, vol. 12, no. 2, 13 Jan. 2022, pp. 13–33, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i2.5229>.
- Baber, Sukrat. "Shout for Freedom to Curse at the Kingdom: Contrasting Thai Lèse Bawōnsak 'Uwannō. *Lèse Majesté in Thailand*. 2014.
- BBC News, COVID-19: Thailand signs contract to purchase vaccines Siam Bioscience
- BBC News, The Royal Institution : "He will silence us" opens the hearts of the young people who were the first to be charged with Section 112, BBC, <https://www.bbc.com/thai/thailand-57486861> (diakses pada 2 Januari 2024)
- Chachavalpongpun, Pavin. "Kingdom of Fear: Royal Governance under Thailand's King Vajiralongkorn." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 3 July 2022, p. 186810342211111, <https://doi.org/10.1177/18681034221111176>.
- Company under the royal name join in action, BBC, <https://www.bbc.com/thai/55097716> (diakses pada 2 Januari 2024)
- Engel, David. *Law and Kingship in Thailand during the Reign of King Chulalongkorn*. University of Michigan Press, 6 Aug. 2020.
- Fathinnuddin, Muhammad. "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, vol. 3, no. 3, 1 Nov. 2016, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i3.7863>.
- Grossman, Nicholas, and Dominic Faulder. "King Bhumibol Adulyadej, a Life's Work: Thailand's Monarchy in Perspective." *CONTEMPORARY SOUTHEAST ASIA*, vol. 34, no. 1, 2012, p. 128, <https://doi.org/10.1355/cs34-1f>.
- Hewison, Kevin. "Thaksin Shinawatra and the Reshaping of Thai Politics." *Contemporary Politics*, vol. 16, no. 2, 21 May 2010, pp. 119–133, <https://doi.org/10.1080/13569771003783810>.
- iLaw Freedom, Thai dresses, fermented fish sauce, section 112 and the changed life of
- Kelly, G. A. "From Lese-Majeste to Lese-Nation: Treason in Eighteenth-Century France." *Journal of the History of Ideas*, vol. 42, no. 2, Apr. 1981, p. 269, <https://doi.org/10.2307/2709320>.
- Majesté Law with United States First Amendment Freedoms." *Indiana International & Comparative Law Review*, vol. 24, no. 3, 3 Jan. 2014, pp. 693–728, <https://doi.org/10.18060/18281>.

**PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA
KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI
MANUSIA MASYARAKAT**

Nagari Yanottami, and Dedik Fitra Suhermanto. "GERAKAN MELAWAN HUKUM MONARKI DI THAILAND." *Jurnal ISIP*, vol. 19, no. 2, 7 Aug. 2023, pp. 66–74, <https://doi.org/10.36451/jisip.v19i2.3>.

New Chatuporn, iLaw Articles, https://freedom.ilaw.or.th/node/912?fbclid=IwAR3KIOo37Y6SzvjV0V1_lhE8AykZUuCyJ9gYPhTGbp6f67vspIlrjkomTG8 (diakses pada 2 Januari 2024)

PPTVHD36, Get to know! "Ice Rakchanok Srinok" MP moves forward after bering hit Puangchon Unchanam. *Royal Capitalism*. 14 Jan. 2020.

Pye, Lucian W., and Paul M. Handley. "The King Never Smiles: A Biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej." *Foreign Affairs*, vol. 85, no. 6, 2006, p. 178, <https://doi.org/10.2307/20032196>.

Selby, Don. *Human Rights in Thailand*. Philadelphia, University Of Pennsylvania Press, 2018.

Wayarabi, Hadi. "Deklarasi Nasional HAM Terhadap Pengembangan Hak-Hak Asasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 22, no. 6, 7 June 2017, p. 552, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no6.1019>.

with 112 cases, PPTV Online, <https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/212422> (diakses pada 2 Januari 2024)